

## OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

Amelia Dara Sagita<sup>1</sup>, Said Musnadi<sup>2</sup>, M. Shabri Abd. Majid<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2,3)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

*Abstract* The objectives of this study are to: (1) describe budget planning, budget implementation, budget accountability, good governance and local government performance (2) test budget planning, budget implementation, budget accountability influence on good governance local government, budget planning, budget implementation and budget accountability affect the performance of local government, (4) implementation of good governance to local government performance (5) examine the indirect effect of budget planning, budget implementation, budget accountability and budget evaluation to local government kinreja through application good governance. This study was conducted on all officials of budget users, financial administration and treasurer of 123 people. The test results indicate that budget planning, budget implementation, budget accountability, good governance and local government performance, good governance implementation affect the performance of local government. The results of budget planning, budget implementation and budget accountability affect the performance of local government, budget planning indirectly affect the performance of local governments through the implementation of good governance, budget implementation indirectly affect the performance of local government through good governance and accountability budget indirectly affect the performance of local governments through the implementation of good governance.

**Keywords** Budget Planning, Budget Implementation, Budget Accountability, Good Governance and Local Government Performance

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, *good governance* dan kinerja Pemerintah Daerah (2) menguji perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap *good governance* Pemerintah Daerah, (3) menguji perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggung-jawaban anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah, (4) pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja Pemerintah Daerah (5) menguji pengaruh tidak langsung perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah melalui penerapan *good governance*. Penelitian ini dilakukan terhadap semua pejabat pengguna anggaran, penatausahaan keuangan dan bendahara sebanyak 123 orang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, *good governance* dan kinerja Pemerintah Daerah, pelaksanaan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggung-jawaban anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, perencanaan anggaran secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui pelaksanaan *good governance*, pelaksanaan anggaran secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui *good governance* dan pertanggung-jawaban anggaran secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui pelaksanaan *good governance*..

Kata kunci : **Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban Anggaran, Good Governancedan Kinerja Pemerintah Daerah**

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Safrida, 2010).

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Anggaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan instansi pemerintah yang menunjukkan bagaimana tahap perencanaan dilaksanakan. Anggaran menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi karena memuat suatu set keluaran yang diinginkan.

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* merupakan bagian dari *good governance*. Terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya *good governance* ditunjukkan dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah yang merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan masalah instansi yang bersangkutan.

Dalam upaya peningkatan kinerja pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya secara terus menerus melakukan perbaikan dalam penyajian pelaporan keuangan yang meliputi segala aspek baik yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan maupun mekanisme penyampaian informasi keuangan itu sendiri.

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan nilai informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika nilai informasi laporan keuangan buruk, artinya laporan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan, tidak disusun sesuai standar pelaporan dan tidak andal dalam penyampaiannya maka hal ini akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan penyajian laporan itu sendiri. Nilai informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, Akuntansi Sektor Publik memiliki peranan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas publik (Mahmudi, 2007:3).

Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga sektor publik, baik di pusat maupun daerah sangat berkaitan dengan tugas pemerintah untuk

menegakkan akuntabilitas finansial, baik di daerah maupun pusat yang masing-masing bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya, (Indriasari, 2008).

Seiring dengan semakin meningkatnya volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dari tahun ke tahun, maka dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002).

Berdasarkan fenomena di atas dapat kita jelaskan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, evaluasi anggaran belum memberikan dampak terhadap penerapan *good governance* sehingga akan memberikan dampak

terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat diwujudkan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan.

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Kinerja**

Kata kinerja merupakan istilah yang sudah lazim diberikan untuk kata "*performance*" yang berarti pekerjaan dan perbuatan. Dalam pengertian yang lebih luas kata-kata *performance* selalu dipergunakan dengan kata-kata seperti *job performance* atau *work performance* yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja (Robbins, 2012: 167).

Kemudian Prawirosentoso (2013: 2) menyatakan bahwa "prestasi kerja atau produktivitas merupakan hasil kerja yang dapat dicapai dalam sebuah organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang diembannya".

Dalam keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara No. 589/IX/6Y/2013 Tanggal 20 September 2013 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi (LAN: 2013).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kinerja dapat diartikan sebagai gambaran tentang sesuatu yang

dicapai dalam suatu waktu, biasanya dalam wujud prestasi yang diperlihatkan melalui hasil-hasil yang telah dicapai baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai dengan harapan yang tertuang dalam suatu tujuan organisasi.

### **Perencanaan Anggaran**

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004.

Adapun indikator perencanaan anggaran meliputi: (1) RPJMD, (2) RKPD, (3) Dokumen KUA, (4) Perencanaan anggaran, (5) Program dan kegiatan, (6) Adanya sinkronisasi.

### **Pelaksanaan Anggaran**

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada

persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

Menurut Mardiasmo, (2010), Indikator pelaksanaan anggaran terdiri atas: (1) Pelaksanaan anggaran, (2) Dokumen anggaran dan (3) Mengikuti prosedur.

### **Pertanggungjawaban Anggaran**

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup;

- a. Laporan realisasi anggaran SKPD
- b. Neraca SKPD
- c. Catatan atas laporan keuangan SKPD

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik

kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Adapun indikator pertanggungjawaban anggaran menurut Mardiasmo. (2010), terdiri atas: (1) Membuat laporan, (2) Laporan sesuai SAP, (3) Pertanggung-jawaban APBD.

### ***Good Governance***

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan masalah yang paling penting dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatkannya tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya pengaruh globalisasi.

Ganie-Rochman (2003) menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain.

Menurut Krina, (2003) bahwa indikator *good governance* pada pemerintahan meliputi: (1) Perumusan visi, misi, (2) Perumusan indikator kinerja, (3) Ada tidaknya komitmen dari pimpinan dan

seluruh staf, (4) Ada sistem yang mampu menjamin penggunaan sumber daya, (5) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, (6) Evaluasi kinerja program dan kegiatan.

Adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability*, dan (4) *participation* (Asian Development Bank, Loina 2003: 7). Jelas bahwa prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi yang lain. Namun setidaknya ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu : akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik / masyarakat.

*Good governance* (GG) memiliki beragam pengertian, begitu pula dengan prinsipnya. Hal ini tergantung pada pihak yang mengeluarkan prinsip tersebut. Tidak ada satu prinsip baku yang dapat diterapkan untuk tiap-tiap perusahaan., karena memiliki perbedaan sifat dan jenis yang mendasar. Prinsip merupakan suatu perangkat yang harus dimiliki dan diterapkan guna mendorong tercipta dan tercapainya penerapan *good governance* dalam meningkatkan kinerja perusahaan, serta sebagai evaluasi dari pelaksanaan GG itu sendiri.

Beberapa institusi yang menaruh perhatian terhadap pengembangan konsep *good governance*, seperti *Organization for Economic Co-operation and Development*

(OECD) merupakan salah satu lembaga yang mempunyai inisiatif mempromosikan konsep *corporate governance* dan telah mengeluarkan beberapa prinsip GG yang dikembangkan seluas mungkin.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, penelitian dilaksanakan langsung pada SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, evaluasi anggaran, good governance dan kinerja Pemkab Aceh Jaya.

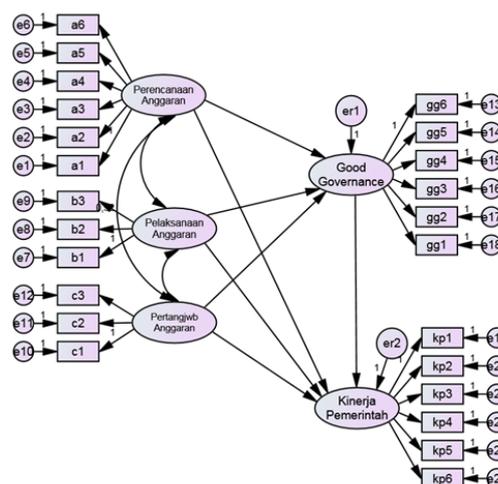
### Peralatan Analisis Data

Peralatan analisis untuk hipotesis pertama menggunakan uji deskriptif dengan menggunakan model statistik deskriptif yaitu berdasarkan nilai rerata dari masing-masing variabel yang akan diteliti, dengan asumsi apabila nilai rerata  $\leq 4$ , maka dipersepsikan secara kurang baik dan apabila nilai rerata  $\geq 4$ , maka dipersepsikan secara baik oleh responden.

Peralatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *structural equation modelling* (SEM) dengan bantuan program AMOS 22. Model persamaan SEM adalah sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan relative rumit secara

simultan (Ferdinand, 2012: 181).

Tampilnya model yang rumit membawa dampak bahwa dalam kenyataannya proses pengambilan keputusan manajemen adalah sebuah proses yang rumit atau merupakan sebuah proses yang multidimensional dengan berbagai pola hubungan kausalitas yang berjenjang. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah model sekaligus alat analisis yang mampu mengakomodasi penelitian multidimensional itu. Dalam penelitian ini, diagram alur (*path diagram*) dapat dilihat dalam Gambar 3.1. berikut ini:



Gambar1. Analisis Jalur

## HASIL PEMBAHASAN

### Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Good Governance

Pengujian pengaruh perencanaan anggaran terhadap good governance menunjukkan nilai CR sebesar 6,079 dan dengan probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai yang diperoleh tersebut memenuhi syarat untuk penerimaan H1 yaitu nilai CR sebesar 6,079 yang lebih besar dari 1,97

dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya berpengaruh terhadap peningkatan good governance Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

#### **Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Good Governance**

Pengujian pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap good governance menunjukkan nilai CR sebesar 6,740 dan dengan probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai tersebut diperoleh memenuhi syarat untuk penerimaan H2 yaitu nilai CR sebesar 6,740 yang lebih besar dari 1,97 dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya berpengaruh terhadap peningkatan good governance.

#### **Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Good Governance**

Pengujian pengaruh pertanggungjawaban anggaran terhadap good governance menunjukkan nilai CR sebesar 6,274 dan dengan probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai tersebut diperoleh memenuhi syarat untuk penerimaan H3 yaitu nilai CR sebesar 6,274 yang lebih besar dari 1,97 dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa pertanggungjawaban anggaran yang dibebankan kepada pemerintah daerah memberikan pengaruh terhadap peningkatan good governance pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

#### **Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengujian pengaruh good governance terhadap kinerja pemerintah menunjukkan nilai CR sebesar 6,579 dan dengan probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai tersebut diperoleh memenuhi syarat untuk penerimaan H4 yaitu nilai CR sebesar 6,579 yang lebih besar dari 1,97 dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa good governance akan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

#### **Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengujian pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah menunjukkan nilai CR sebesar 4,253 dan dengan probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai tersebut diperoleh memenuhi syarat untuk penerimaan H5 yaitu nilai CR sebesar 4,253 yang lebih besar dari 1,97 dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

### **Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengujian pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah menunjukkan nilai CR sebesar 4,296 dan dengan probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai tersebut diperoleh memenuhi syarat untuk penerimaan H6 yaitu nilai CR sebesar 4,296 yang lebih besar dari 1,97 dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

### **Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengujian pengaruh komunikasi terhadap kinerja pemerintah menunjukkan nilai CR sebesar 3,634 dan dengan probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai tersebut diperoleh memenuhi syarat untuk penerimaan H7 yaitu nilai CR sebesar 3,634 yang lebih besar dari 1,97 dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan oleh pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

### **Pengaruh Tidak Langsung Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran dan Pertanggungjawaban anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Good governancenya**

Pengaruh langsung variabel perencanaan anggaran terhadap good governance adalah 0,229. Sementara pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah bila melalui variabel good governance adalah 0,274. Ini berarti bila ingin meningkatkan kinerja pemerintah oleh pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Pengaruh langsung variabel pelaksanaan anggaran terhadap good governance adalah 0,372. Sementara pengaruh pelaksanaan anggaran memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah bila melalui variabel good governance adalah 0,294. Ini berarti bila ingin meningkatkan kinerja pemerintah oleh pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Pengaruh langsung variabel pertanggungjawaban anggaran terhadap good governance adalah 0,223. Sementara pengaruh pertanggungjawaban anggaran kerja terhadap kinerja pemerintah bila melalui variabel *good governance* adalah 0,270.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap good

- governance Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Aceh Jaya.
2. Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Aceh Jaya.
  3. Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Aceh Jaya.
  4. Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Aceh Jaya.
  5. Pelaksanaan anggaran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Aceh Jaya.
  6. Pertanggungjawaban anggaran membuktikan bahwa pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Aceh Jaya.
  7. Good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Aceh Jaya.
  8. Terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Aceh Jaya melalui good governance.

### **Saran**

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Aceh Jaya berdasarkan perspektif perencanaan anggaran, maka yang harus dilakukan adalah pihak pemerintah harus dapat menjabarkan Dokumen RPJMD terutama berkaitan visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai di masa depan.
2. Kemudian peningkatan pelaksanaan anggaran yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkaitan dengan pelaksanaan anggaran SKPD yang mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan harus dapat dilaksanakan.
3. Kemudian masalah pertanggungjawaban anggaran yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkaitan dengan laporan keuangan SKPD dan Pemda yang telah dibuat harus sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih jelas.
4. Dalam rangka meningkatkan good governance Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Aceh Jaya secara keseluruhan, maka yang perlu diperhatikan adalah pemerintah harus mampu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan target organisasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Basri Hasan,(2011), Pengaruh kualitas anggaran proyek terhadap efektivitas pengendalian proyek-proyek konstruksi pada Perusahaan Jasa Kontruksi di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Bastian, Indra (2012), *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Dinata, Anton Mulhar. 2011. *Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya Good Governance di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Donnelly, Mike, John F. Dalrymple, & Ivan P. Hollingsworth. 1994. "The Use and Development of Information Systems and Technology in Scottish Local Government". *International Journal of Public Sector Management*. Vol. 7 No. 3. Hal.4-15.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPF, Yogyakarta.
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*. Norwalk.
- Haris, Interview langsung Staf KPPN Aceh
- Hayaturrahmi (2012), Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas-dinas dan Badan Pemerintahan di Kota Banda Aceh
- Hevesi, G. Alan. 2014. *Standards for Internal Control in New York State Government*. [www.osc.state.ny.us](http://www.osc.state.ny.us).
- Imelda. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Indriasari, dan Nahartyo (2008), Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nurhatyo (2008), "Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Sinopsium Nasional Akuntansi*, XII, Pontianak.
- Krina P, Loina, dan Lalolo (2003), *Indikator & Alat ukur Akuntabilitas, Trasparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance Bappenas.
- Mahmudi (2013), *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat umum dalam pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, Politik:*" Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

- Malhotra, K, Naresh, (2014), *Riset Pemasaran Pendekatan Terapan*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2010. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.
- Muslichah (2002), "Pengaruh Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial", *Jurnal Akuntansi Petra*, Vol. 4 No. 2, November, Semarang, Hal. 106-125
- Rhonda (2003), *Budgeting for Equity: Gender Budget Initiatives Within a Framework of Performance Oriented Budgeting*
- Safrida Yuliani, (2010) Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 3. No. 2. Juli 2010. Hal. 206-220.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York.
- Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66.
- Supriyanto (2000), *Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*, **Simposium Nasional Akuntansi 10, Juli 2013, Makasar.**
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari 2001. Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. [www.gtzsfdm.or.id](http://www.gtzsfdm.or.id).
- Waspada. Sabtu, 26 April 2008. "Aceh Tak Terpisahkan dari NKRI"
- Suharto, A. A. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri. Kediri: *Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 1, Nomor 3*. Universitas Kadiri.
- Indarto, S. L. & Ayu, S. D. 2011. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, dan Job Relevant Information (JRI). Semarang: *Jurnal Ilmiah Vol. 14, No. 1, 35-36*. Unika Soegijapranata Semarang.